



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Nama : Alif Diva Ariasena

NPM : 191003742017530

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**Nama : Alif Diva Ariasena
NPM : 191003742017530**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**

**Maridjo, SH.MH
NIDN.: 0611056001**

Anggota,

**Sri Murni, SH.,MH
NIDN : 06-1712-6501**

Anggota,

**Agnes Maria Janni Widyawati, SH.,MH
NIDN : 06-2501-6402**



**Prof. Dr. Ruyat Mulyono, SH., M.Hum.
NIDN.06-0402-6002**

**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II Tinjauan Pustaka	12
A. Tinjauan Penerapan hukum Pidana.....	12
B. Pengertian Narkotika.	18
C. Jenis Narkotika	20
D. Penyalahgunaan Narkotika	27
E. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Narkotika	33
BAB III Metode Penelitian	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Sumber Data	36

	D. Metode Pengumpulan Data	37
	E. Metode Penyajian Data	39
	F. Metode Analisis Data	39
BAB IV	Hasil Penelitian dan Analisis Data.....	40
	A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang	40
	B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang Dan Upaya Mengatasinya	60
BAB V	Penutup	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69

Daftar Pustaka

ABSTRAK

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Penegakan hukum pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, walaupun telah diatur tentang pidana berat, namun masih saja terdapat pelaku tindak pidana Narkotika. Penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi Hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Analisa dilakukan dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang putusannya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Narkotika. Kendala yang dihadapi pada praktik persidangan seringkali dihadapkan pada terdakwa-terdakwa yang masih berusia sangat muda dan produktif, adanya tuntutan masyarakat dimana mengharapkan agar pelaku tindak pidana Narkotika dapat dihukum secara maksimal, dan penjatuhan pidana denda menjadi tidak efektif, mengingat besarnya nominal yang ditetapkan di dalam Undang-undang Narkotika.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Narkotika.